

BAB 2

KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai penerapan Sistem NSW tahap pertama belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun, terdapat beberapa penelitian dengan tema yang serupa. Penelitian pertama berjudul "*Penerapan Sistem Electronic Data Interchange (EDI) dalam Bidang Kepabeanan PT. X (Ditinjau dari Prinsip Ease of Administration)*", yang ditulis oleh FX Heru Purwono sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial Ilmu Administrasi. Penelitian Kedua berjudul "*Pengaruh Kebijakan Pelayanan dan Aplikasi Sistem EDI terhadap Kualitas Pelayanan Kepabeanan pada KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok I (Studi Kasus Reformasi Pelayanan Publik oleh Birokrasi Dipandang sebagai Proses Learning Organization)*", yang ditulis oleh Ricky Mohamad Hanafie, seorang Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Administrasi FISIP-UI.

Fokus pada penelitian pertama adalah untuk mengetahui bagaimana implikasi penggunaan Sistem EDI dalam bidang kepabeanan terhadap pelaksanaan kewajiban penyampaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilakukan oleh PT. X (PPJK) untuk kepentingan importir ditinjau dari prinsip *ease of administration*. Sedangkan fokus dari penelitian kedua adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan reformasi pelayanan dan aplikasi Sistem EDI terhadap kualitas pelayanan di bidang impor pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe A Khusus Tanjung Priok I. Sementara itu, fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dan kendala Sistem NSW tahap pertama pada pemenuhan kewajiban pabean (khususnya pada proses *customs clearance*) IJP ditinjau dari asas *ease of administration* di KPU Tanjung Priok.

Pendekatan pada penelitian pertama adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi literatur. Sedangkan penelitian kedua menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, studi literatur, dan studi lapangan dengan menggunakan instrument penelitian berupa kuesioner. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan studi literatur.

Kesimpulan dari penelitian pertama adalah bahwa jika dilihat dari kepastian hukum, efisiensi, kemudahan, kenyamanan dan manfaat administrasi yang di dapatkan PT. X setelah menggunakan Sistem EDI, maka dapat dikatakan bahwa Sistem EDI memberi kemudahan administrasi bagi PT. X. Sedangkan hasil penelitian kedua menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif kebijakan reformasi pelayanan dan aplikasi Sistem EDI terhadap kualitas pelayanan kepabeanaan pada KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok I. Selain itu, penelitian kedua juga menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan kepabeanaan di KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok I dapat ditingkatkan dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan reformasi pelayanan dan dengan meningkatkan juga efektivitas dan efisiensi aplikasi Sistem EDI dalam proses pelayanan tersebut. Adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam tinjauan pustaka dijabarkan melalui tabel berikut ini.

TABEL 2.1
PERBEDAAN PENELITIAN INI DENGAN PENELITIAN SEBELUMNYA

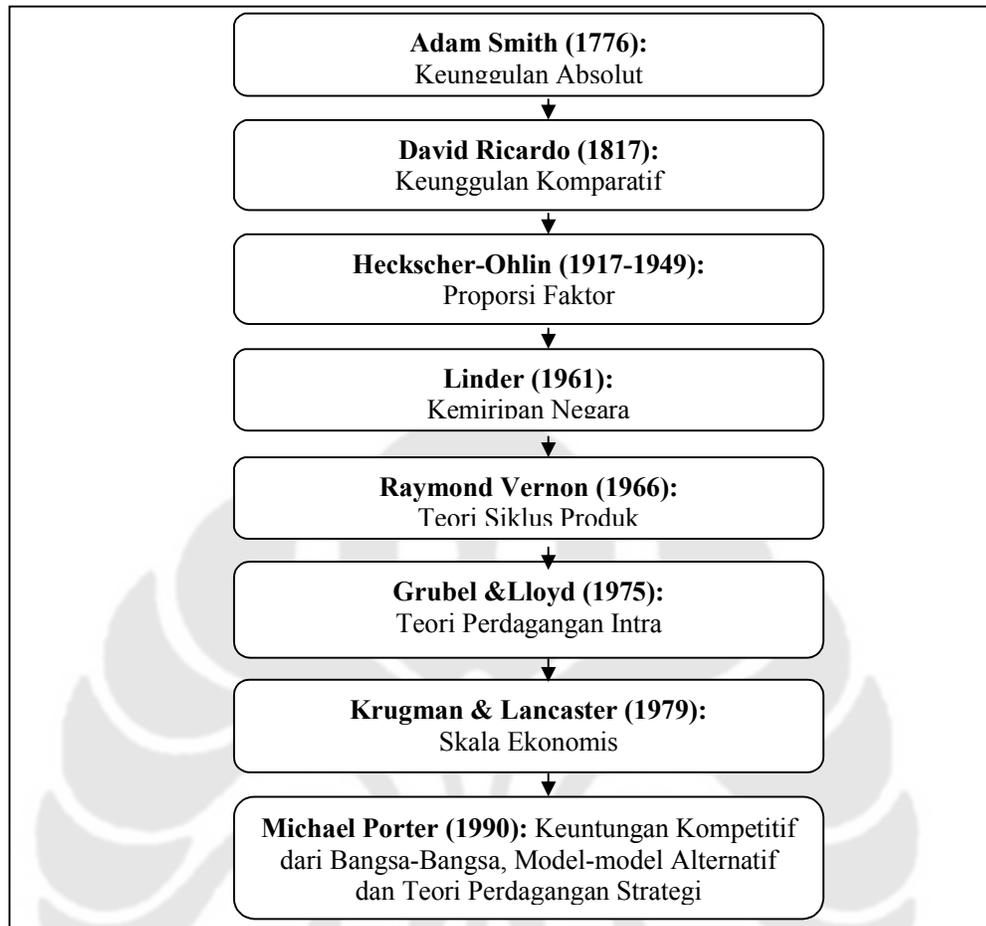
	Penelitian I	Penelitian II	Penelitian Ini
Judul	“Penerapan Sistem <i>Electronic Data Interchange</i> (EDI) dalam Bidang Kepabeanan PT. X (Ditinjau dari Prinsip <i>Ease of Administration</i>)”	“Pengaruh Kebijakan Pelayanan dan Aplikasi Sistem EDI terhadap Kualitas Pelayanan Kepabeanan pada KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok I (Studi Kasus Reformasi Pelayanan Publik oleh Birokrasi Dipandang sebagai Proses <i>Learning Organization</i>)”	“Penerapan Sistem <i>National Single Window</i> (NSW) Tahap Pertama Pada Pemenuhan Kewajiban Pabean Berdasarkan Asas <i>Ease of Administration</i> (Studi pada KPU Tanjung Priok)”
Pokok Permasalahan	Bagaimana implikasi penggunaan sistem EDI dalam bidang kepabeanan terhadap pelaksanaan kewajiban penyampaian PIB yang dilakukan oleh PT. X (PPJK) untuk kepentingan importir ditinjau dari prinsip <i>ease of administration</i> ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah terdapat pengaruh kebijakan reformasi pelayanan terhadap kualitas pelayanan kepabeanan di bidang impor pada KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok I? 2. Apakah terdapat pengaruh aplikasi Sistem EDI terhadap kualitas pelayanan kepabeanan di bidang impor pada KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok I? 3. Apakah terdapat pengaruh kebijakan reformasi pelayanan dan aplikasi Sistem EDI secara bersama-sama terhadap kualitas pelayanan di bidang impor pada KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok I? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan Sistem NSW Tahap Pertama Pada Pemenuhan Kewajiban Pabean Berdasarkan Asas <i>Ease of Administration</i> di KPU Tanjung Priok? 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem <i>National Single Window</i> (NSW) Tahap Pertama di KPU Tanjung Priok?
Pendekatan Penelitian	Kualitatif	Kuantitatif	Kuantitatif
Keterkaitan Ketiga Penelitian	Ketiga penelitian ini mengkaji penerapan sistem elektronik kepabeanan guna meningkatkan pelayanan dan kelancaran arus impor barang		
Metode Penelitian	Studi Lapangan dan Studi Literatur	Wawancara, Studi literatur, dan Studi lapangan (Kuesioner)	Wawancara dan Studi literatur
Perbedaan Lainnya	Objek Penelitian: Sistem <i>Electronic Data Interchange</i> (EDI)	Objek Penelitian: Kebijakan Reformasi Pelayanan Kepabeanan dan Sistem <i>Electronic Data Interchange</i> (EDI)	Objek Penelitian: Sistem <i>National Single Window</i> (NSW)

Sumber: diolah oleh peneliti

2.1.1 Perdagangan Internasional

Perdagangan lintas negara atau lebih dikenal sebagai perdagangan internasional, sebenarnya sudah ada sejak dahulu, namun dalam ruang lingkup dan jumlah yang terbatas. Perbedaan sumber daya alam, iklim, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya serta jumlah penduduk menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi antara tiap-tiap negara. Dari perbedaan tersebut, setiap negara memiliki ketergantungan untuk saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Dalam skala yang luas, proses pertukaran yang terjadi disebut dengan perdagangan internasional. Menurut Tambunan (2000, p.1), perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai perdagangan antar atau lintas negara, yang mencakup ekspor dan impor.

Pada awalnya, perdagangan internasional dilakukan atas objek barang dan jasa dengan cara barter, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan setempat yang tidak dapat diproduksi secara mandiri. Saat ini, perdagangan internasional telah jauh berkembang, dimana objek yang diperdagangkan bukan lagi hanya sebatas barang dan jasa melainkan aset-aset yang mengandung resiko, seperti saham dan valuta asing. Tujuan dari perdagangan internasional juga telah mengalami pergeseran. Perdagangan internasional tidak lagi hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan internal suatu negara, melainkan sebagai upaya politik dan ekonomi untuk memperoleh keuntungan serta meningkatkan penerimaan nasional. Sukirno berpendapat bahwa manfaat perdagangan internasional, antara lain suatu negara dapat memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, negara dapat memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar dan menambah keuntungan serta transfer teknologi modern ("Perdagangan", n.d.). Gambar berikut ini merupakan ilustrasi dari perkembangan teori perdagangan internasional dari waktu ke waktu.



GAMBAR 2.1

EVOLUSI TEORI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Sumber: Tulus Tambunan, *Perdagangan Internasional dan neraca Pembayaran: Teori dan Temuan Empiris*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2000), diolah oleh peneliti

2.1.1.1 Teori Keunggulan Absolut

Teori keunggulan absolut atau keuntungan mutlak sering juga disebut sebagai teori murni perdagangan internasional. Yang dimaksud dengan keuntungan mutlak adalah keuntungan yang diperoleh sesuatu negara dari melakukan spesialisasi dalam kegiatan menghasilkan produksinya kepada barang-barang yang efisiensinya lebih tinggi daripada di negara-negara lain (Sukirno, n.d., p.275). Dasar pemikiran dari teori ini adalah bahwa suatu negara akan melakukan spesialisasi dan ekspor terhadap suatu atau beberapa jenis barang tertentu, di mana negara tersebut memiliki keunggulan absolut dan tidak memproduksi atau impor sesuatu atau beberapa jenis barang tertentu dimana

negara tersebut tidak mempunyai keunggulan absolut atas negara lain yang memproduksi jenis barang yang sama.

2.1.1.2 Teori Keunggulan Komparatif

Teori keunggulan komparatif dapat dianggap sebagai kritik terhadap teori keunggulan absolut. Dasar pemikiran Ricardo mengenai penyebab terjadinya perdagangan internasional adalah bahwa perdagangan antara dua negara akan terjadi bila masing-masing negara memiliki biaya relatif yang terkecil untuk jenis barang yang berbeda (Tambunan, 2001, p.57). Berdasarkan teori ini, perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan efisiensi dan produktivitas relatif antar negara dalam memproduksi dua (atau lebih) jenis barang.

2.1.1.3 Teori Hecksher dan Ohlin (H-O)

Ide dasar model H-O adalah negara yang melimpah tenaga kerja, secara relatif akan memanfaatkan kemampuan dirinya untuk memproduksi barang dengan faktor produksi padat karya yang relatif lebih murah (Halwani, 2000, p.38). Menurut teori ini, peranan suatu negara dalam perdagangan ditentukan oleh faktor bawaan dari faktor-faktor produksi yang dimiliki. Tiap negara akan berspesialisasi pada jenis barang tertentu yang bahan baku atau faktor produksi utamanya berlimpah atau harganya murah di negara tersebut dan kemudian mengekspornya. Di lain pihak, negara akan mengimpor barang-barang yang bahan baku atau faktor produksi utamanya langka atau mahal.

2.1.1.4 Teori Kemiripan Negara

Inti dari teori kemiripan negara adalah bahwa perdagangan akan terjadi diantara negara yang memiliki ciri serupa, terutama dalam hal selera dan tingkat pendapatan. Tambunan (2001, p.62) mengutip Linder bahwa para produsen di sebuah negara akan memperkenalkan produk-produk baru mereka ke pasar domestik terlebih dahulu, karena mereka lebih mengenal pasar di negara sendiri. Berdasarkan teori ini, peningkatan tipe, kompleksitas dan diversifikasi produk akan berjalan bersamaan dengan peningkatan pendapatan negara. Setelah memasarkan produknya di pasar dalam negeri, langkah selanjutnya dari para

produsen adalah dengan mengekspor produknya ke negara lain yang selera dan tingkat pendapatannya sama.

2.1.1.5 Teori Siklus Produk

Keunggulan komparatif berubah mengikuti perubahan waktu dari satu negara ke nagara lain. Menurut Vernon, banyak barang yang melalui siklus produk yang prosesnya bisa pendek atau panjang, yang terdiri dari 4 tahap, yakni pengembangan atau penciptaan (inovasi) atau introduksi, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan (Tambunan, 2001, p.82). Sedangkan Cho dan Moon, dalam Tambunan (2001, p.82), menggunakan dasar pemikiran dari model siklus produk untuk menerangkan dinamika dari daya saing internasional dari sejumlah industri di dunia, yang juga melewati 4 tahap: tahap awal, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap penurunan.

2.1.1.6 Teori Perdagangan Intra

Pada dasarnya terdapat dua jenis perdagangan, yakni perdagangan interindustri dan perdagangan intraindustri. Perdagangan interindustri adalah perdagangan antara dua industri yang berbeda. Sedangkan perdagangan intraindustri adalah perdagangan di dalam industri yang sama (Tambunan, 2001, p.84). Perdagangan interindustri mencerminkan keunggulan komparatif yang berbeda antar industri yang berbeda. Tambunan (2000, p.85) mengutip penjelasan Paul Krugman bahwa perubahan pola perdagangan, termasuk perdagangan intraindustri, berdasarkan ketidaksempurnaan faktor pasar maupun faktor produk.

2.1.1.7 Teori Skala Ekonomis

Skala ekonomis adalah suatu skala produksi dimana pada titik optimalnya, produksi bisa menghasilkan biaya satu unit *output* terendah (Tambunan, 2001, p.73). Dalam teori ini, jika terdapat skala ekonomis, suatu perusahaan di suatu negara dapat berspesialisasi dalam produksi suatu jangkauan produksi yang terbatas. Kemudian mengeksportnya dengan harga lebih murah dari produk yang sama dari perusahaan lain yang tidak memiliki skala ekonomis.

2.1.1.8 Model Berlian Keunggulan Kompetitif

Porter (1996) mengakhiri evolusi dari perdagangan internasional dengan menyatakan keunggulan bersaing suatu negara tergantung pada kapasitas industri dalam melakukan inovasi dan peningkatan. Perusahaan meraih keunggulan bersaing disebabkan oleh tekanan dan persaingan. Keunggulan perusahaan didapat dari keinginan yang kuat terhadap persaingan domestik, agresif dari supplier lokal dan permintaan pelanggan lokal.

2.1.2 Birokrasi Kepabeanan

Menurut Kristiadi dalam Pasolong (2007, p.67), birokrasi merupakan struktur organisasi di sektor pemerintahan, yang memiliki ruang lingkup tugas-tugas yang sangat luas serta memerlukan organisasi besar dengan sumber daya manusia yang besar pula jumlahnya. Birokrasi juga dapat dikatakan sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan tugas kenegaraan, yang salah satu perannya adalah sebagai lembaga penyelenggara pelayanan pemerintahan. Menurut Braibanti yang dikutip oleh Zauhar (1996, p.37), birokrasi yang kuat merupakan institusi yang sangat vital di dalam mencapai integrasi dan pembangunan nasional. Adapun, prinsip-prinsip dasar terjadinya birokrasi menurut Weber, seorang sosiolog besar Jerman, yang dikutip oleh Boediono (2003, p.22) adalah sebagai berikut:

1. didesentralisasikan dan menurut hierarkhi;
2. diatur dengan peraturan: hukum dan peraturan administrasi;
3. didesentralisasikan dan berlaku umum;
4. menggunakan proses administrasi, yaitu dalam mencapai tujuannya mempekerjakan pegawai sendiri dan tidak dikontrakkan;
5. memilih staf/pegawai berdasarkan ujian, tidak menurut kriteria subjektif.

Pabean atau *customs* (dalam Bahasa Inggris) atau *duane* (dalam Bahasa Belanda) adalah instansi (jawatan, kantor) yang mengawasi, memungut, dan mengurus Bea Masuk (impor) dan Bea Keluar (ekspor), baik melalui darat, laut maupun melalui udara (Purwito, 2006, p.32). Pabean juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan ekspor-impor dan pemungutan bea atau pajak atas impor barang. Merujuk dari definisi birokrasi dan

pabean diatas, maka birokrasi kepabeanan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan organisasi atau institusi pemerintahan yang menjalankan tugas pelayanan dan pengawasan dalam rangka ekspor-impor.

Departemen Keuangan merupakan salah satu bentuk birokrasi dalam lingkungan ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan operasionalnya, Departemen Keuangan terdiri dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Anggaran, dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. DJBC merupakan birokrasi kepabeanan yang menangani prosedur ekspor-impor di Indonesia. Namun, DJBC bukanlah satu-satunya birokrasi yang terkait dengan prosedur tersebut. Setidaknya ada 29 instansi pemerintahan yang terkait dalam prosedur ekspor-impor, sebagai instansi pemerintahan penerbit perijinan ekspor-impor di Indonesia, seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Departemen Perdagangan, Badan Karantina Pertanian, Pusat Karantina Ikan, Departemen Kesehatan, Departemen Perhubungan, POLRI, Departemen Luar Negeri, dan lain sebagainya. Purwito (2006, p.33) menegaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya birokrasi kepabeanan menganut beberapa aspek, antara lain:

1. Keadilan, sehingga kewajiban kepabeanan hanya kepada anggota masyarakat yang melakukan kegiatan kepabeanan dan terhadap mereka diperlakukan sama dalam hal dan kondisi yang sama (*non-discriminative*). Aspek ini melindungi semua yang melakukan kegiatan kepabeanan seperti: importir, eksportir, PPJK, *forwarder*, pengangkut, masing-masing mempunyai hak yang sama dalam pelayanan, kewajiban dan tanggung jawab.
2. Pemberian Insentif, terutama bagi investor dan produsen, seperti: tempat penimbunan berikat, gudang berikat, yang diberikan pembebasan dan keringanan atas impor mesin dan bahan baku dalam rangka ekspor dan pemberian persetujuan impor barang sebelum pelunasan Bea Masuk dilakukan (*pre notification*). Meskipun sifatnya bertahap dan sementara waktu, tetapi diharapkan insentif di bidang Bea Masuk yang diberikan atau disediakan pemerintah akan dapat memberikan manfaat dan mendukung perekonomian nasional.
3. Netralitas dalam pemungutan Bea Masuk untuk menghindari distorsi yang dapat mengganggu perekonomian nasional.
4. Kelayakan adminitrasi dapat dilaksanakan secara tertib, terkendali, sederhana dan transparan. Tertib administrasi

berdampak atas pengurangan penyimpangan-penyimpangan yang kemungkinan akan terjadi dan berisiko, atau setidaknya tidaknya dapat merupakan hambatan bagi timbulnya biaya tinggi dalam pengurusan barang impor/ekspor di pelabuhan. Tata laksana yang tertib dan sederhana, serta transparan dalam keputusan yang diambil akan mudah dipahami oleh masyarakat pengguna jasa kepabeanan.

5. Pengendalian, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi atas apa yang terjadi dilapangan dapat diketahui dengan cepat dari bidang administrasi. Dengan kata lain, bahwa administrasi tersebut dapat dikelola dan merupakan sarana pengawasan yang baik.
6. Praktik kepabeanan internasional, sebagaimana diatur di dalam persetujuan perdagangan internasional.

Dengan demikian, untuk mencapai hasil yang optimal baik OGA maupun DJBC sebagai birokrasi kepabeanan dalam menjalankan implementasi Sistem NSW tahap pertama harus tetap mengacu pada keenam aspek kepabeanan tersebut.

2.1.3 Reformasi Pelayanan Kepabeanan

Menurut Wyckof dalam Tjiptono (1998, p.59), pelayanan diartikan sebagai tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi atau lembaga lain yang tidak termasuk badan usaha swasta, yang tidak berorientasi pada laba (Boediono, 2003, p.59). Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk tanggung jawab birokrasi suatu negara. Penyelenggaraan pelayanan merupakan tugas, kewajiban dan fungsi dari pemerintah kepada masyarakatnya. Hal serupa dikemukakan Bryant dan White dalam Moenir (1998, p.26) bahwa tugas penting yang diletakkan dipundak pemerintah ialah menyelenggarakan penyampaian pelayanan publik.

Semakin baik dan terpenuhinya tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa publik yang berkualitas dari pemerintah, maka akan ada kecenderungan peningkatan citra pemerintah, yang juga akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik merupakan kewajiban pemerintah. Seperti yang dikemukakan Rasyid (1997, p.76), sebagai berikut:

”Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh respek yang tinggi dari masyarakatnya adalah melalui optimalisasi pelayanan publik. Upaya perbaikan terhadap kualitas pelayanan secara terus-menerus dilakukan dengan memberikan pelayanan terbaik dan selalu berusaha memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Pemberian pelayanan yang berkualitas memang merupakan tugas pemerintah”

Menurut Kasmir dalam Pasolong (2007, p.133), pelayanan yang baik adalah kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan standar yang ditentukan. Pelayanan kepabeanan yang berkualitas di bidang ekspor-impor dari pemerintah kini menjadi tuntutan kebutuhan para eksportir dan importir. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepabeanan, pemerintah melakukan reformasi di bidang kepabeanan. Menurut Covey yang dikutip oleh Yulianto (2005, p.66), reformasi sebuah organisasi dicirikan oleh transformasi orang dan organisasi secara literal; yang mencakup perubahan pola pikir dan prilaku, pengembangan visi, tujuan dan sistem.

Program reformasi kepabeanan yang disusun pemerintah, diawali dengan perbaikan struktur organisasi dan pelayanan di lingkungan DJBC. Salah satu bentuk komitmen BC dalam melaksanakan program reformasi kepabeanan adalah dengan menyediakan otomasi proses pelayanan kepabeanan. CFRS dan Sistem EDI merupakan dua sistem otomasi kepabeanan yang diterapkan DJBC dalam memperbaiki pelayanan kepabeanan nasional.

Kini, melalui Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 juncto Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2005, pemerintah membentuk Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor. Tim yang melibatkan berbagai instansi yang terkait ekspor-impor tersebut, dibentuk untuk meningkatkan kelancaran arus barang ekspor-impor dan meningkatkan pengelolaan sistem pelayanan antar entitas di pelabuhan. Melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007, pemerintah secara resmi menetapkan Sistem NSW sebagai salah satu program reformasi kebijakan kepabeanan nasional di Indonesia.

2.1.4 Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah pemahaman mendalam akan suatu kebijakan atau pula pengkajian untuk merumuskan kebijakan (Dwidjowijoto, 2006, p.50). Seperti perkataan Dunn yang disadur oleh Dwidjowijoto (2007, p.7), analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Dengan melakukan analisis kebijakan, seseorang dapat mengoptimalkan pencapaian suatu kebijakan dengan melakukan perbaikan pada proses perumusan, implementasi, dan kinerja kebijakan.

Dalam proses kebijakan publik ada tiga tahapan pokok yaitu perumusan (*formulation*), penerapan (*implementation*) dan penilaian (*evaluation*). Dalam tahap perumusan kebijakan, suatu kebijakan dianalisa sejauh mana kompleksitas permasalahan, tingkat keterlibatan para pelaku (masyarakat, pemerintah dan pihak lain yang terkait) serta sejauh mana dampak dari kebijakan tersebut. Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Dwidjowijoto (2006, p.140), yang dimaksud implementasi kebijakan adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Sedangkan yang dimaksud evaluasi kebijakan adalah penilaian atas hasil atau kemanfaatan suatu kebijakan (Dwidjowijoto, 2006, p.50). Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan mempunyai nilai, karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan telah mencapai tingkat kinerja yang diharapkan, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dapat teratasi. Menurut Dunn (1999, p.613), evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

Dari ketiga tahap proses kebijakan publik diatas, tahap penerapan atau implementasi kebijakan merupakan suatu tahap yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Seperti pernyataan Udoji dalam Wahab (1990, p.59):

"The execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented"

Berdasarkan pernyataan tersebut, implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dibandingkan dengan proses pembuatan kebijakan, karena suatu kebijakan akan hanya menjadi sebuah susunan peraturan yang tersusun rapi apabila tidak diterapkan.

Tahap penerapan atau implementasi Sistem NSW merupakan kelanjutan dari tahapan perumusan pembangunan dan pengembangan Sistem NSW di tingkat nasional serta perumusan pembangunan dan pengembangan Sistem ASW di tingkat regional. Dalam tahap implementasi ini, serangkaian rancangan kebijakan pembangunan dan pengembangan Sistem NSW yang sudah dirumuskan diterapkan. Oleh karena itu, keberhasilan maupun kegagalan kebijakan pembangunan dan pengembangan Sistem NSW sangat ditentukan pada proses implementasinya.

Dalam implementasi kebijakan pada umumnya selalu terdapat berbagai hambatan yang menghalangi pencapaian sasaran kebijakan. Menurut Turner dan Hulme yang dikutip Pasolong (2007, p.59), semua hambatan dalam proses implementasi kebijakan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu hambatan dari dalam dan hambatan dari luar. Hambatan dari dalam dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti sumber daya manusia (SDM), dana, fasilitas, aturan, sistem serta prosedur yang digunakan. Sedangkan hambatan dari luar dapat berasal dari berbagai faktor yang mempunyai kecenderungan mempengaruhi proses implementasi kebijakan, seperti kondisi politik, kecenderungan ekonomi, dan sebagainya. Dalam skripsi ini, peneliti menganalisis penerapan (implementasi) Sistem NSW tahap pertama pada prosedur impor IJP. Kegiatan yang dilakukan peneliti dengan menganalisis tahapan implementasi ini, merupakan langkah awal untuk mengetahui keberhasilan sistem. Dengan menganalisis tahap implementasi Sistem NSW tahap pertama, peneliti bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai penerapan Sistem NSW tahap pertama (pelaksanaan kebijakan) beserta hambatan implementasinya sebagai bahan koreksi bagi perbaikan sistem.

2.1.5 Impor

Transaksi impor adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat tinggal di negara-negara berbeda (Hutabarat, 1995, p.104). Impor merupakan pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. Dalam prosedur ekspor-impor, dikenal istilah kewajiban pabean (*customs formality*). Kewajiban pabean adalah kewajiban yang harus dipenuhi para pelaku ekspor-impor dalam melaksanakan prosedur ekspor-impor. Di bidang impor terdapat dua kewajiban pabean yang harus dipenuhi, yaitu penyelesaian dokumen-dokumen impor (*customs clearance*) dan pelunasan Bea Masuk, serta PDRI. Dokumen-dokumen impor yang harus dilengkapi dalam pemenuhan kewajiban kepabeanan di bidang impor, antara lain Dokumen Pemberitahuan Pabean (dalam hal ini PIB) dan dokumen-dokumen pelengkap impor yang didalamnya mencakup Dokumen Perijinan Impor. Adapun, yang termasuk dalam PDRI antara lain PPN, PPnBM, PPh pasal 22 dan cukai. Pengenaan PDRI bergantung pada jenis barang yang diimpor.

Sistem importasi umumnya diawali oleh penempatan order yang terdiri dari uraian dan jumlah barang oleh importir kepada eksportir. Kemudian importir membuka *Letter of Credit* (L/C) pada Bank Devisa Persepsi atas nama eksportir. Pengertian L/C menurut Henius, seperti yang dikutip oleh Halwani (2000, p.514) adalah sebagai berikut.

“The letter of credit is a written instrument issued by the buyer’s bank, authorizing the seller to draw in accordance with certain terms and stipulating in legal form that all such bill (drafts) will be honoured. It sets forth under what terms and conditions that person in whose favour the letter has been opened may draw drafts against such credit, at the same time guaranteeing that payment of acceptance of such drafts if they comply with the letter’s term.”

Secara sederhana, L/C merupakan suatu pernyataan tertulis dari bank atas permintaan nasabahnya (importir) untuk menyediakan sejumlah uang atau menjamin pembayaran bagi kepentingan pihak ketiga (eksportir) apabila telah dipenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam L/C yang bersangkutan. Setelah importir mengajukan permohonan pembukaan L/C, Bank Devisa Persepsi akan menyelenggarakan pembukaan L/C. Selanjutnya, Bank Devisa Persepsi akan

menerima *shipping documents* dari eksportir yang terdiri dari *Bill of Lading* (B/L), *invoice* dan *packing list*. Setelah importir menyelesaikan tagihannya, Bank Devisa Persepsi akan menyerahkan *shipping documents* tersebut kepada importir sebagai alat untuk pengeluaran barang di pelabuhan. B/L yang telah diterima importir harus diserahkan aslinya kepada pihak pelayaran untuk ditukarkan dengan *Delivery Order* (DO) sebagai bukti bahwa importir telah menyelesaikan kewajibannya kepada pihak pelayaran.

Importir kemudian dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk dan PDRI kepada Bank Devisa Persepsi sekaligus mengurus pengajuan permohonan perijinan impor bila diperlukan. Selanjutnya, importir dapat mengajukan PIB yang dilengkapi dengan dokumen pelengkap serta bukti pembayaran Bea Masuk (BM) dan PDRI kepada Bea dan Cukai (BC). Bila barang yang diimpor tergolong barang yang dilarang atau dibatasi, maka PIB dan dokumen lainnya akan melalui tahap *analyzing point*. Setelah itu, akan dilakukan penetapan jalur untuk setiap barang yang akan diimpor.

TABEL 2.2
MEKANISME PENJALURAN DAN PERLAKUANNYA

Perlakuan/Pelayanan	Merah	Kuning	Hijau	MITA Prioritas	MITA Non-Prioritas
	●	●	●	●	●
Rekonsiliasi Pembayaran Atau Jaminan	□	□	□	□	
Konfirmasi Perijinan	□	□	□		
Penelitian Dokumen	□	□			
Pemeriksaan Fisik	□	□			
SPPB	□	□	□	□	□
Pemeriksaan Dokumen			□		
				●	●

Sumber: KPU Tanjung Priok, diolah oleh peneliti

Pada tabel 2.2 diketahui bahwa terdapat 5 (empat) tipe penjaluran terhadap transaksi impor di BC, yaitu jalur merah, jalur kuning, jalur hijau dan jalur Mitra Utama (MITA), yang terdiri dari MITA Prioritas dan MITA Non-

Prioritas. Pada jalur merah dilakukan intervensi atas dokumen dan fisik barang yang masuk jalur tersebut. Selain itu, pada jalur merah barang impor diijinkan keluar setelah seluruh kewajiban pungutan impor dipenuhi. Sedangkan pada jalur kuning intervensi hanya dilakukan pada dokumen kepabeanan dan barang impor diijinkan keluar setelah seluruh kewajiban pungutan impor dipenuhi. Pada jalur hijau, intervensi juga hanya dilakukan pada dokumen kepabeanan tetapi berbeda dengan jalur kuning, pada jalur ini barang impor dapat segera dikeluarkan. Berbeda dengan seluruh jalur lainnya, pada jalur MITA, yang terdiri dari Jalur Prioritas dan Jalur Non Prioritas, tidak terdapat intervensi apapun dimana pemeriksaan ditunda hingga proses *post clearance*.

Dengan adanya Sistem NSW, kini dimungkinkan adanya pertukaran data antara pelaku impor dengan instansi-instansi pemerintahan yang terkait dalam hal pengurusan prosedur perijinan dan kelengkapan dokumen-dokumen impor. Dengan demikian, diharapkan Sistem NSW dapat memberikan kemudahan administrasi bagi importir maupun PPJK dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban kepabeanan. Selain itu, dengan adanya Sistem NSW pemerintah juga mengharapkan adanya kemudahan bagi instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap jalannya prosedur importisasi.

2.1.6 *Electronic Government (e-Government)*

Era globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan telah menyamarkan batasan negara yang telah berlaku selama ini. Dengan adanya kondisi tersebut diharapkan hambatan bisnis dan perdagangan antar negara dapat berkurang sehingga interaksi antar masyarakat internasional menjadi efisien dan efektif. Penerapan teknologi juga turut memperlancar proses perdagangan internasional, dengan cara mempercepat proses pertukaran informasi dan transaksi perdagangan.

Teknologi dapat dirumuskan sebagai penerapan sistematis akal budi kolektif manusia guna mencapai penguasaan atas alam yang lebih besar dan semua proses yang bersifat manusiawi (Halwani, 1993, p.89). Berikut ini beberapa pengertian teknologi menurut para ahli:

1. Teknologi, menurut Filine Harahap, adalah ilmu pengetahuan industri yang praktis, pengetahuan sistematik

- mengenai kemampuan industri (pengalaman, keterampilan, atau kecenderungan untuk berindustri).
2. Menurut James D. Grant, teknologi adalah keterampilan praktis (*know-know*) untuk penerapan pengetahuan ilmiah dalam penciptaan produk khusus atas pelaksanaan tugas khusus.
 3. Soedjana Sapiie mengatakan bahwa teknologi adalah ilmu pengetahuan (*science*) yang merupakan badan pengetahuan (*body of knowledge*) dan merupakan seni (*body of art*), yang mengundang pengertian bahwa teknologi berhubungan dengan proses produksi. Teknologi menyangkut cara bagaimana berbagai sumber, tanah, modal, tenaga kerja, dan keterampilan dikombinasikan untuk merealisasi tujuan produksi. Hal itu menyangkut implikasi luas yang mencerminkan kebijakan penelitian dan sebagainya yang berlaku dalam masyarakat dalam suatu waktu tertentu (Halwani, 1993, p.90).

Dari ketiga pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teknologi berhubungan dengan penerapan ilmu pengetahuan secara praktis untuk penciptaan barang industri khusus atau tugas khusus yang melibatkan berbagai spektrum usaha manusia dalam mengkombinasikan segala sumber dalam proses produksi.

Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan kemajuan suatu negara. Salah satu tugas dari sebuah pemerintahan adalah membentuk suatu lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya (Indrajit, 2002, p.42). Untuk mendukung tugas tersebut maka pemerintah harus memanfaatkan teknologi digital dalam setiap kegiatannya. Mekanisme birokrasi pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital secara umum disebut *e-Government*. Bank Dunia mendefinisikan *e-Government* sebagai berikut:

“e-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as wide area networks, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses and other arms of government (Hanafie, 2005, p.25)”

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa *e-Government* merupakan suatu bentuk penggunaan teknologi informasi yang dipergunakan institusi pemerintahan untuk mentransformasikan hubungannya dengan masyarakat, para pelaku bisnis maupun institusi pemerintahan yang lain. *e-Government* semakin

banyak diterapkan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology–ICT*). Saat ini, berbagai negara mengimplementasikan *e-Government* guna meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan terutama dalam lingkup pelayanan masyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi segenap warga negaranya. Penerapan *e-Government* menjanjikan setidaknya tiga perubahan dasar, yaitu:

1. Proses otomatisasi: mengubah peran manusia dalam menjalankan proses yang meliputi menerima, menyimpan, processing, output dan mengirimkan informasi
2. Proses informasi: mendukung peran manusia dalam menjalankan proses informasi, misalnya mendukung alur proses pengambilan keputusan, komunikasi dan implementasi
3. Proses transformasi: membuat ICT baru untuk menjalankan proses informasi atau mendukung proses informasi (Indrajit, 2001, p.7).

Sebagai salah satu wujud penerapan dari *e-Government*, Sistem NSW menyediakan fasilitas pengajuan dan pemrosesan informasi standar secara elektronik, guna menyelesaikan semua proses kegiatan dalam penanganan lalu lintas barang ekspor, impor dan transit, untuk meningkatkan daya saing nasional. Sistem NSW melibatkan seluruh instansi pemerintah yang melakukan pelayanan publik terkait dengan kegiatan perdagangan internasional, mulai dari perijinan ekspor-impor (*licences*), penyelesaian dokumen kewajiban kepabeanan (*customs clearance*), penanganan pelayanan fisik barang di pelabuhan (*cargo-handling*), dan layanan lainnya dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam melakukan pelayanan dan pengawasan lalu lintas barang ekspor-impor.

2.1.7 Asas *Ease of Administration*

Dalam pengadministrasian pemungutan pajak, terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam sistem pemungutan pajak tersebut. Asas kemudahan administrasi (*ease of administration*) merupakan suatu hal yang penting dalam suatu sistem pemungutan pajak. Prosedur yang rumit dapat menimbulkan keengganan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, sekaligus menimbulkan kesulitan bagi petugas pajak dalam mengawasinya. Unsur-unsur yang membentuk asas *ease of administration* adalah

certainty, convenience, efficiency, dan simplicity (Rosdiana dan Taringan, 2005, p.132).

2.1.7.1 Kepastian (*certainty*)

Asas *certainty* menyatakan bahwa harus ada kepastian baik bagi petugas pajak maupun semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat. Agar kepastian dalam pemungutan pajak dapat terwujud, maka kepastian hukum merupakan suatu hal yang mutlak. Hal tersebut dipertegas Thuronyi, sebagaimana yang dikutip oleh Devano dan Rahayu (2006, p.63), bahwa konstitusi suatu negara selalu mensyaratkan bahwa pengenaan pajak harus berdasarkan undang-undang. Nurmantu (2003, p.83) menjelaskan bahwa asas *certainty* dimaksudkan supaya pajak yang harus dibayar seseorang harus terang dan pasti tidak dapat dimulur-mulur atau ditawar-tawar. Dengan kata lain, asas ini menekankan pentingnya kepastian mengenai pemungutan pajak yaitu: kepastian mengenai hukum yang mengaturnya, kepastian mengenai subjek pajak, kepastian mengenai objek pajak dan kepastian mengenai tata cara pemungutannya (Judisseno, 2005, p.11). Kepastian dalam perpajakan jelas merupakan hal yang penting untuk menghindari terjadinya berbagai kemungkinan penyimpangan.

2.1.7.2 Efisiensi (*efficiency*)

Dalam Devano dan Rahayu (2006, p.64), Seligman menjelaskan bahwa *efficiency* dimaksudkan supaya sistem perpajakan suatu negara mampu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Rosdiana dan Taringan (2005, p.136) menegaskan bahwa:

“Asas efisiensi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi fiskus, pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban Wajib Pajak) lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi Wajib Pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin.”

Dari penjelasan diatas, diketahui bahwa asas efisiensi dimaksudkan agar sistem dan prosedur perpajakan hendaknya dapat dilaksanakan secara praktis dengan biaya sehemat-hematnya. Dari sisi fiskus, efisiensi dapat diukur dari biaya yang

harus dikeluarkan pemerintah untuk menjalankan sistem administrasi perpajakan (*administrative cost*) serta biaya penegakan hukum dan keadilan (*enforcement cost*). Dari sisi Wajib Pajak, *compliance cost*—biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut:

- a. *Direct Money Cost*, yaitu biaya atau beban yang dapat diukur dengan nilai uang yang harus dikeluarkan/ditanggung oleh Wajib Pajak berkaitan dengan proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan.
- b. *Time Cost*, yaitu biaya berupa waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan.
- c. *Psychic Cost*, yaitu biaya psikis/psikologis—antara lain berupa stress dan atau ketidaktenangan, kegamangan, kegelisahan, ketidakpastian—yang terjadi dalam proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan (Rosdiana dan Taringan, 2005, p.136-137).

2.1.7.3 Kenyamanan (*convenience*)

Devano dan Rahayu (2006, p.63) mengutip pernyataan Smith bahwa kaidah *convenience* dimaksudkan supaya dalam memungut pajak, pemerintah hendaknya memperhatikan saat-saat yang paling baik bagi si pembayar pajak. Sedangkan Supramono dan Damayanti (2005, p.5) menyatakan bahwa pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Hal yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh Rochmat Soemitro, sebagaimana yang dikutip oleh Devano dan Rahayu (2006, p.63), bahwa pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat Wajib Pajak mempunyai uang. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat ditegaskan bahwa asas *convenience* menekankan pentingnya mempertimbangkan saat dan waktu yang tepat bagi pembayar pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.7.4 Kesederhanaan (*simplicity*).

Sistem dan prosedur perpajakan hendaknya sederhana dan tidak berbelit-belit. Rosdiana dan Taringan (2005, p.140) mengutip pernyataan Brown dan Jakson, yaitu:

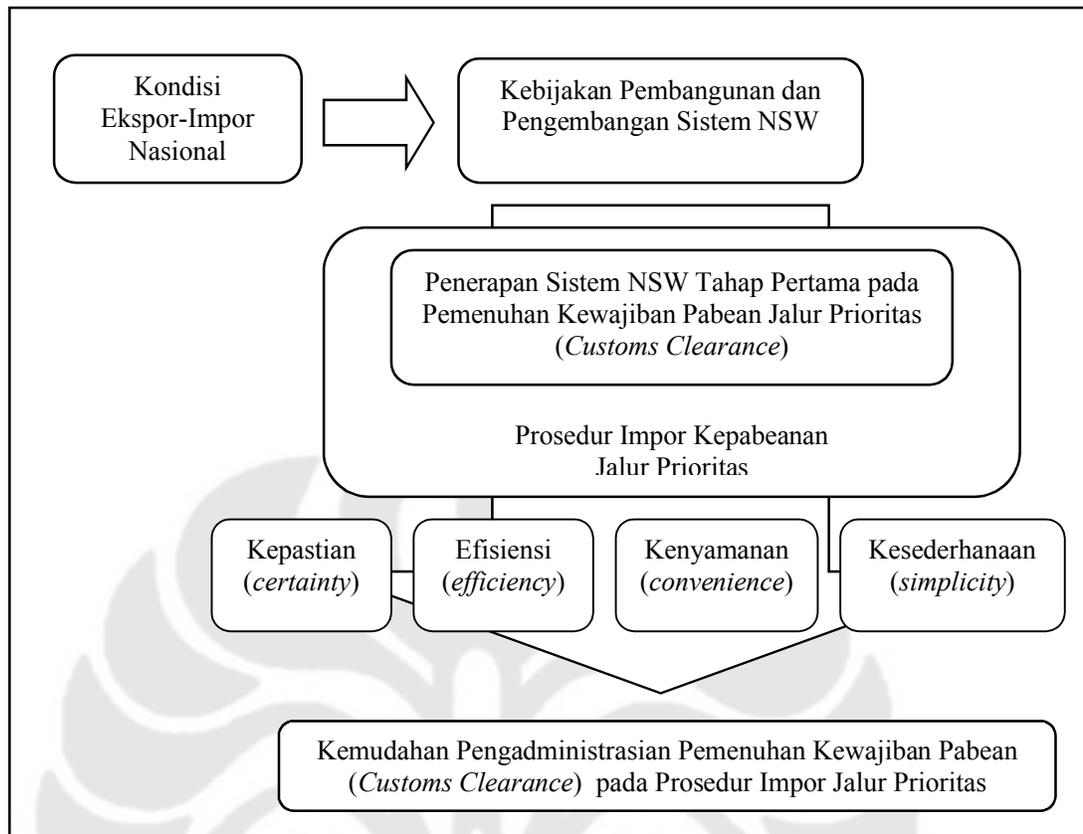
“Taxes should be sufficiently simple so that those affected can be understand them.”

Dari pernyataan tersebut, diketahui bahwa sistem dan prosedur perpajakan yang sederhana akan memudahkan Wajib Pajak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sistem dan prosedur perpajakan yang praktis dan mudah dilaksanakan diharapkan kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

Seperti halnya dengan sistem dan prosedur perpajakan, sistem dan prosedur kepabeanan hendaknya menganut nilai-nilai asas *ease of administration*. Kepastian, efisiensi, kenyamanan dan kesederhanaan sistem dan prosedur kepabeanan akan memudahkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban kepabeanan bagi importir, eksportir maupun PPJK. Di lain pihak, hal tersebut juga memudahkan petugas kepabeanan untuk memantau, mengawasi dan memeriksa pelaksanaan pemenuhan kewajiban kepabeanan tersebut.

2.2 Kerangka Pemikiran

Sebagai kerangka penelitian, peneliti membuat suatu alur pemikiran mengenai konsep dan tahapan penelitian dari awal hingga akhir. Sebagai gambaran penelitian, berikut ini disajikan kerangka pemikiran dari penelitian ini beserta penjelasannya:



GAMBAR 2.2
KERANGKA PEMIKIRAN

Sumber: diolah oleh Peneliti

Semakin pesatnya pola perkembangan perdagangan internasional yang ditandai dengan meningkatnya intensitas kegiatan ekspor-impor di dunia telah mendorong instansi kepabeanan di masing-masing negara untuk memperbaiki kualitas pelayanannya guna meningkatkan daya saing negaranya, termasuk Indonesia. Kondisi pelayanan ekspor-impor nasional saat ini masih dihadapkan dengan berbagai hambatan, diantaranya adanya pengenaan biaya-biaya informal serta rumitnya regulasi dan birokrasi pelayanan. Besarnya hambatan serta beban yang ditanggung para pelaku ekspor-impor di Indonesia telah mendorong pemerintah untuk berusaha meminimalisir hambatan yang ada dengan cara membangun dan mengembangkan suatu sistem informasi kepabeanan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepabeanan.

Sebagai tindak lanjut pemerintah dalam memperbaiki kondisi pelayanan ekspor-impor di Indonesia, pemerintah melalui DJBC telah melakukan serangkaian kegiatan reformasi di bidang kepabeanan, antara lain dengan melakukan pemanfaatan teknologi sistem informasi di bidang kepabeanan melalui CFRS dan Sistem EDI dalam kegiatan ekspor-impor. Pada akhir Desember 2007, pemerintah melalui Menteri Keuangan meresmikan penerapan Sistem NSW tahap pertama di KPU Tanjung Priok. Sistem NSW merupakan sistem informasi pelayanan kepabeanan yang memungkinkan adanya pertukaran data secara elektronik antara instansi pemerintahan dan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan ekspor-impor guna meningkatkan daya saing nasional. Tujuan diterapkannya sistem ini adalah untuk mempercepat pelayanan kegiatan ekspor-impor dan meminimalisir biaya-biaya yang diperlukan diperlukan dalam seluruh kegiatan ekspor-impor. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama ini, antara lain KPU Tanjung Priok, BPOM, Departemen Perdagangan, Badan Karantina Pertanian, Pusat Karantina Ikan, dan seluruh IJP yang berjumlah 100 (seratus) perusahaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai penerapan Sistem NSW tahap pertama pada pemenuhan kewajiban pabean, terutama pada proses *customs clearance*, IJP berdasarkan asas kemudahan administrasi (*ease of administration*) di KPU Tanjung Priok beserta kendala-kendala dihadapinya. Dalam melakukan analisis, peneliti mengawalinya dengan memaparkan penjelasan mengenai kebijakan penerapan Sistem NSW tahap pertama, yang dilengkapi dengan data-data hasil wawancara (penelitian). Selanjutnya, peneliti menganalisis proses pelaksanaan penerapan Sistem NSW tahap pertama pada pemenuhan kewajiban pabean (khususnya pada proses *customs clearance*) IJP ditinjau dari asas kemudahan administrasi (*ease of administration*), yang terdiri dari asas *certainty* (kepastian), asas *convenience* (kenyamanan), asas *efficiency* (efisiensi) dan asas *simplicity* (kesederhanaan). Kemudian peneliti melakukan analisis terhadap kendala-kendala penerapan sistem di lapangan dan penelitian diakhiri dengan penarikan kesimpulan oleh peneliti.

2.3 Metode Penelitian

Dalam arti kata yang sesungguhnya, metode (Yunani: *methodos*) adalah cara atau jalan (Koentjaraningrat, 1993, p.7). Dengan demikian, metodologi penelitian dapat didefinisikan sebagai cara atau jalan untuk mencari pemecahan terhadap segala permasalahan penelitian. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai metode yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti, yang dimulai dengan penjelasan mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode dan strategi penelitian, hipotesis penelitian, narasumber atau informan, proses penelitian, penentuan site penelitian, dan batasan penelitian.

2.3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini menggunakan cara pandang deduktif dimana teori ditempatkan sebagai acuan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Creswell (1994, p.1-2) mendefinisikan pendekatan kuantitatif sebagai berikut:

“an inquiry into a social or human problem, based on testing a theory composed of variables, measured with numbers, and analyzed with statistical procedures, in order to determine whether the predictive generalizations of the theory hold true.”

Dari definisi tersebut, yang dimaksud dengan pendekatan kuantitatif adalah sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan suatu teori yang terdiri dari variable-variabel yang dapat diukur dengan angka, dan dianalisa melalui suatu prosedur statistik guna mendapatkan suatu gambaran atas teori yang dianut. Adapun, beberapa ciri-ciri penelitian kuantitatif menurut Neuman (2003, p.145) antara lain penelitian dimulai dengan pengujian hipotesis; konsep dijabarkan dalam bentuk variabel yang jelas; pengukuran telah dibuat secara sistematis sebelum data dikumpulkan dan ada standarisasinya; data berbentuk angka yang berasal dari pengukuran; teori yang digunakan umumnya berupa sebab akibat dan deduktif; analisa dilakukan dengan statistik, tabel, diagram, dan didiskusikan bagaimana hubungannya dengan hipotesis.

2.3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan, manfaat, dan dimensi waktu. Berdasarkan tujuan penelitian secara umum, maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Definisi penelitian deskriptif menurut Babbie (2004, p.114) adalah sebagai berikut:

“Description is the precise measurement and reporting of the characteristics of some population or phenomenon under study.”

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran yang lengkap mengenai karakteristik sosial dan hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian. Adapun, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Sistem NSW tahap pertama dan kendala yang dihadapi dalam proses penerapannya.

Berdasarkan manfaat penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian murni. Penelitian ini dilakukan dalam kerangka akademik dan tidak dibuat berdasarkan kepentingan lain diluar akademik. Selain itu, penelitian ini memenuhi karakteristik penelitian murni yang dikemukakan oleh Cresswell (1994, p.62), yaitu sebagai berikut :

1. *Research problems and subjects are selected with a great deal of freedom.*
2. *Research is judged by absolute norm of scientific rigor, and the highest standards of scholarship are sought*
3. *The driving goal is to contribute to basic, theoretical knowledge.*

Berdasarkan dimensi waktu, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian *cross-sectional*. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Babbie (2004, p.101) sebagai berikut *“A cross-sectional study involves observations of a sampel, a cross section, of a population or phenomenon that are made at one point in time.”* Berdasarkan definisi tersebut, penelitian *cross-sectional* meliputi observasi terhadap sampel populasi atau fenomena yang dilaksanakan pada satu waktu tertentu.

2.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1993, p.7). Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

2.3.3.1 Studi Dokumen

Dokumen sebagai bahan klasik untuk meneliti perkembangan historis yang khusus biasanya digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan tentang apa, kapan dan di mana (Koentjaraningrat, 1993, p.47). Salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Hal ini dilakukan dengan membaca dan mengkaji berbagai literature para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen publik lain yang terkait dengan permasalahan penelitian. Studi dokumen sangat beerguna dalam membantu penelitian ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang dekat dengan gejala yang dipelajari, memberikan informasi dalam menyusun permasalahan yang tepat, hingga membantu dalam pembuatan analisa penelitian.

2.3.3.2 Wawancara/Interview

Metode wawancara atau metode interview, mencakup cara yang dipergunakan kalau seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu (Koentjaraningrat, 1993, p.129). Teknik wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara berencana (*standardized interview*), dimana sebelum melaksanakan proses wawancara peneliti telah merancang suatu daftar pertanyaan yang menjadi pedoman bagi peneliti dalam mengajukan pertanyaan.

2.3.4 Hipotesis Kerja

Dalam Sarwono (2006, p.37), Nasution menjelaskan bahwa definisi hipotesis ialah pernyataan tentative yang merupakan dugaan mengenai apa saja

yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Hipotesis merupakan kesimpulan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Berdasarkan kerangka konseptual yang telah disusun maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah penerapan Sistem NSW tahap pertama mewujudkan kemudahan administrasi pemenuhan kewajiban pabean IJP, khususnya pada pemenuhan proses *customs clearance*.

2.3.5 Narasumber / Informan

Untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman mengenai permasalahan, peneliti menentukan narasumber atau informan dalam penelitian. Narasumber yang dipilih dalam penelitian harus memiliki informasi yang cukup mengenai permasalahan yang akan diteliti sehingga peneliti dapat memahami mengenai permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Berdasarkan judul penelitian ini yaitu Analisis Penerapan Sistem *National Single Window* (NSW) Tahap Pertama, maka peneliti menetapkan beberapa narasumber/informan yang terdiri dari:

1. Edy Putera Irawady yang menjabat sebagai Deputy Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, selaku Sekretaris Tim Persiapan NSW;
2. Nurul Huda yang menjabat sebagai Kepala Seksi Otomasi Sistem dan Prosedur Impor dan Ekspor, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, selaku Anggota Satuan Tugas Bidang Teknologi Informasi Tim Persiapan NSW;
3. Anni Mulyati yang menjabat sebagai Kepala Seksi Direktorat Fasilitas Ekspor Impor, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, selaku Perwakilan dari Institusi Penerbit Perijinan Impor (OGA) yang terlibat dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama;
4. Diah Hetty Sitomurti yang menjabat sebagai Kepala Unit Bidang Teknologi Informasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), selaku Perwakilan dari Institusi Penerbit Perijinan Impor (OGA) yang terlibat dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama;

5. Rahmat Hidayat selaku Ketua Kompartemen Birokrasi dan Regulasi Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP);
6. Importir Jalur Prioritas dan Pengusaha Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK) selaku *User* Sistem NSW.

2.3.6 Strategi dan Proses Penelitian

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Sistem NSW pada pemenuhan kewajiban pabean IJP jika ditinjau dari asas kemudahan administrasi (*ease of administration*) di KPU Tanjung Priok. Penerapan Sistem NSW tahap pertama, sebagai wujud *e-Government* pemerintah di bidang kepabeanan, merupakan hal yang baru bagi sistem pelayanan kepabeanan secara keseluruhan di Indonesia. Ditengah kondisi pelayanan ekspor-impor yang dinilai kurang efektif, sistem ini diterapkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan meminimalisasi biaya pemenuhan kewajiban kepabeanan. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk membahas bagaimana penerapan sistem itu pada prosedur impor (khususnya pada proses *customs clearance*) Jalur Prioritas ditinjau dari asas kemudahan administrasi (*ease of administration*). Prinsip kemudahan administrasi tersebut dapat dilihat dari 4 (empat) asas yaitu asas *certainty* (kepastian), asas *convenience* (kenyamanan), asas *efficiency* (efisiensi) dan asas *simplicity* (kesederhanaan).

Strategi yang dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan dari Importir maupun PPJK Jalur Prioritas. Selain itu, peneliti mewawancarai beberapa informan lain yang berasal dari luar perusahaan seperti dari Tim Persiapan NSW dan OGA. Disamping itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP). Dalam melakukan wawancara, peneliti berusaha untuk menggali informasi sedalam-dalamnya dari informan khususnya ketika peneliti melakukan wawancara dengan pihak Importir. Kemudian, peneliti melakukan analisis secara mendalam terhadap hasil wawancara untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem NSW tahap pertama ini berlangsung jika ditinjau dari kemudahan administrasi (*ease of administration*).

2.3.7 Operasionalisasi Konsep

Berdasarkan teori kemudahan administrasi (*ease of administration*) yang telah disebutkan di atas, maka yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

2.3.7.1 Kepastian (*Certainty*)

Dalam penelitian ini, kepastian yang dimaksud meliputi kepastian hukum penerapan Sistem NSW, prosedur pengaplikasian Sistem NSW, biaya penggunaan Sistem NSW, serta kepastian waktu dan biaya penanganan *customs clearance* pada pemenuhan kewajiban pabean melalui Sistem NSW. Selain itu, kepastian akan kepastian dalam penelitian ini juga mencakup kepastian validitas dan akurasi data yang di input dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban Jalur Prioritas. Adapun kepastian mengenai kepastian mengenai subjek pajak, kepastian mengenai objek pajak tidak dibahas karena pada dasarnya Sistem ini tidak mengatur atau mengubah ketentuan mengenai subjek atau wajib pajak dalam prosedur importasi.

2.3.7.2 Efisiensi (*Efficiency*)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, efisiensi dimaksudkan agar sistem dan prosedur perpajakan hendaknya dapat dilaksanakan secara praktis dengan biaya sehemat-hematnya. Dalam penelitian ini, pengukuran dimensi efisiensi dibatasi terkait dengan efisiensi biaya, tenaga dan waktu yang dikeluarkan serta mengurangi rasa cemas IJP dalam hal menyelesaikan proses *customs clearance* dalam memenuhi kewajiban impor kepabeanannya.

2.3.7.3 Kenyamanan (*Convenience*)

Dengan penerapan Sistem NSW, prosedur impor dilaksanakan secara elektronik dan terotomasi. Penelitian ini ingin melihat pengaruh tersebut pada segi kenyamanan para pelaku impor, seperti kenyamanan layanan dan fungsi sistem dalam pengurusan *customs clearance*, kenyamanan dalam mencari informasi

mengenai NSW dan kenyamanan dengan adanya transparansi akses dan informasi seputar importasi.

2.3.7.4 Kesederhanaan (*Simplicity*)

Kesederhanaan dan kemudahan prosedur impor merupakan unsur penting yang mempengaruhi kecenderungan perilaku para pelaku impor dalam melaksanakan kewajiban kepabeanannya. Penelitian ini melihat kemudahan importir dalam memahami tata cara pengaplikasian sistem dan ketentuan-ketentuan yang terkait didalamnya serta untuk mengetahui apakah penerapan Sistem NSW dapat menyederhanakan tata cara penanganan *customs clearance* pada pemenuhan kewajiban pabean Jalur Prioritas.

Dengan demikian matriks pengembangan instrumen yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut :

TABEL 2.3
MATRIKS PENGEMBANGAN INSTRUMEN

Konsep	Variabel	Dimensi	Indikator
Kemudahan Administrasi (<i>Ease Of Administration</i>)	Kemudahan Administrasi (<i>Ease Of Administration</i>)	! Kepastian (<i>Certainty</i>)	a) Kepastian hukum penerapan Sistem NSW tahap pertama dalam penanganan proses <i>customs clearance</i> pada pemenuhan kewajiban pabean IJP. b) Kepastian tentang prosedur pengaplikasian Sistem NSW tahap pertama dalam penanganan proses <i>customs clearance</i> pada pemenuhan kewajiban pabean IJP. c) Kepastian biaya penggunaan Sistem NSW dalam penanganan proses <i>customs clearance</i> pada pemenuhan kewajiban pabean IJP.

Konsep	Variabel	Dimensi	Indikator
Kemudahan Administrasi (<i>Ease Of Administration</i>)	Kemudahan Administrasi (<i>Ease Of Administration</i>)	! Kepastian (<i>Certainty</i>)	d) Kepastian waktu penanganan proses <i>customs clearance</i> pada pemenuhan kewajiban pabean IJP. e) Kepastian biaya penanganan proses <i>customs clearance</i> pada pemenuhan kewajiban pabean IJP. f) Kepastian validitas dan akurasi data dalam Sistem NSW.
		! Efisiensi (<i>Efficiency</i>)	a) Efisiensi biaya yang dikeluarkan IJP maupun PPJK dalam penanganan proses <i>customs clearance</i> pada pemenuhan kewajiban pabean IJP . b) Efisiensi waktu yang dikeluarkan IJP maupun PPJK dalam penanganan proses <i>customs clearance</i> pada pemenuhan kewajiban pabean IJP. c) Efisiensi tenaga yang dikeluarkan IJP maupun PPJK dalam penanganan proses <i>customs clearance</i> pada pemenuhan kewajiban pabean IJP. d) Sistem NSW mengurangi rasa cemas dalam IJP dalam penanganan proses <i>customs clearance</i> pada pemenuhan kewajiban pabean IJP.

Konsep	Variabel	Dimensi	Indikator
Kemudahan Administrasi (<i>Ease Of Administration</i>)	Kemudahan Administrasi (<i>Ease Of Administration</i>)	! Kenyamanan (<i>Convenience</i>)	a) Kenyamanan importir maupun PPJK yang atas layanan dan fasilitas sistem dalam penanganan proses <i>customs clearance</i> pada pemenuhan kewajiban pabean IJP. b) Kenyamanan importir maupun PPJK dalam mencari informasi mengenai NSW. c) Kenyamanan importir maupun PPJK atas akses dan informasi seputar importisasi melalui Sistem NSW
		! Kesederhanaan (<i>Simplicity</i>)	a) Kemudahan importir maupun PPJK dalam memahami Sistem NSW b) Kemudahan tata cara penanganan <i>customs clearance</i> pada pemenuhan kewajiban pabean IJP melalui Sistem NSW

Sumber: diolah oleh peneliti

2.3.8 Penentuan Site Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada beberapa site atau lokasi penelitian, yaitu Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Perusahaan Importir Jalur Prioritas dan beberapa lokasi lain. Namun, lokasi penelitian yang utama difokuskan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok di Jalan Pabean No. 1 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pemilihan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok sebagai

lokasi penelitian yang utama dilakukan peneliti dengan mempertimbangkan bahwa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok merupakan lokasi *pilot project* penerapan Sistem NSW.

2.3.9 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini memiliki arah tujuan analisis yang jelas, maka peneliti menyusun suatu batasan penelitian. Penelitian dalam skripsi ini ditujukan untuk menganalisis penerapan Sistem NSW tahap pertama. Penelitian ini dibatasi hanya pada pembahasan mengenai bagaimana penerapan Sistem NSW tahap pertama, yang berlangsung sejak Desember 2007 hingga Juni 2008, pada pemenuhan kewajiban pabean (khususnya prosedur *customs clearance*) IJP di KPU Tanjung Priok Jakarta yang ditinjau berdasarkan asas *ease of administration*. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi IJP pada proses importisasi melalui penerapan Sistem NSW tahap pertama.

2.3.10 Keterbatasan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, Peneliti menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan data (khususnya data kuantitatif) yang dapat disajikan dalam skripsi ini. Hal ini dikarenakan sejumlah data yang terkait dengan penelitian ini belum dapat dipublikasikan oleh informan.